BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi suatu permasalahan yang sangat penting dalam bidang penerimaan pajak, jika pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan terjadi penghambatan dalam pembangunan negara (Aprilliany 2020)

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam UU No. 28 tahun 2009, jenis pajak tingkat provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu pertama nilai jual kendaraan bermotor (harga pasaran umum) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) ("Bobot"). Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hanya nilai jual kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor, pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan

bermotor. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Target pajak kendaraan bermotor Samsat Kabupaten Kudus, pada 2022 ini mengalami kenaikan, yaitu mencapai Rp 174 miliar dari yang sebelumnya di 2021 sebesar Rp 160 miliar.

Target yang ditetapkan tersebut terbilang tinggi. Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. Samsat Kabupaten Kudus mengupayakan penambahan titik pelayanan pajak kendaraan. Dari yang sebelumnya hanya ada 22 titik, di 2021 bertambah delapan, menjadi 30 titik pelayanan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

	PKB (Rp)
Target Tahun 2020	174.800.000.000
Target Perubahan	152.900.000.000
Januari	12.966.849.500
Februari	11.568.972.900
Maret	12.423.927.425
April	10.726.691.700
Mei	9.849.566.225
Juni	12.765.296.850
Juli	13.207.913.050
Agustus	12.172.473.175
September	12.489.959.125
	PKB (Rp)
Oktober	12.515.539.175

November	12.283.777.000
Desember	14.304.921.500
	147.275.887.625

Sumber: SAMSAT Kab.Kudus Tahun 2020

Dari data Tabel 1.1, menunjukkan bahwa SAMSAT Kudus tidak bisa mencapai target yang mereka tentukan, maka perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Namun sering terjadi kendala dalam melakukan pengoptimalan pemasukkan pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak. Diperlukannya kesadaran wajib pajak untuk memaksimalkan pemasukan pemerintah daerah karna dengan meningginya rasa kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dapat dilihat dari kemauan serta kegigihan wajib pajak dalam menyelenggarakan peran perpajakannya hal itu berarti wajib pajak sudah memiliki kesadaran dalam melunasi utang pajaknya sehingga terhindar dari adanya sanksi perpajakan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan dalam penguatan hukum berfungsi sebagai pemantau kepada wajib pajak yang lalai dalam melakukan tata tertib perpajakan kendaraan bermotor, adanya sanksi berat berupa denda yang dapat merugikan wajib pajak akibat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib

pajak kendaraan bermotor mereka akan patuh karena mengingat akan sanksi yang ada. Maka dari itu sanksi dianggap menjadi komponen penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajibannya dibidang perpajakan.

Didukung dengan adanya pemberian kualitas pelayanan publik yang baik, adil dan jelasnya proses perpajakan oleh petugas pemerintah dapat menambah rasa puas wajib pajak sehingga wajib pajak akan tunduk dalam kewajibannya membayar pajak dan dapat meningkatkan pemasukan pajak daerah.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan Nila Sari Agustin dkk (2019). Perbedaan yang pertama penelitian Nila Sari Agustin dkk (2019) dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan dan sistem samsat keliling. Sosialisasi perpajakan ditambahkan dalam penelitian ini karena sosialisasi adalah sesuatu kegiatan yang wajib dilakukan agar masyarakat mengetahui apa itu kepatuhan wajib pajak kendaraan. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk mengedukasi masyarakat umum tentang perpajakan dan peraturan perundang-undangan pada khususnya serta membantu mereka lebih memahaminya. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak (Dharma 2014) Sedangkan untuk variabel kedua yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah sistem samsat keliling. Sistem SAMSAT keliling ditambahkan karena dengan adanya penerapan sistem samsat keliling akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dimana sistem samsat keliling sendiri menjadikan masyarakat yang jauh dari kantor pusat bisa lebih mudah dalam melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan.

Perbedaan kedua, jika dalam penelitian Nila Sari Agustin dkk (2019) objek penelitiannya yaitu seluruh wajib pajak kendaraan yang ada di kantor SAMSAT Kota Batam. sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu seluruh wajib pajak kendaraan yang ada di SAMSAT Kabupaten Kudus.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan yang ada di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus. Inkonsistensi pada penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang dikembangkan dari jurnal Nila Sari Agustin dkk (2019) dengan menambah beberapa variabel, judul dari penelitian ini adalah **“PENGARUH KESADARAN MASYARAKAT, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SISTEM SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KUDUS”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang penelitian di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksiperpajakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sistem samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- e. Untuk mengetahui pengaruh SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi akademis-

akademis yang mempelajari mengenai ilmu perpajakan, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bayangan dan kontribusi gagasan kepada masyarakat luas, masukan-masukan maupun arahan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai masalah-masalah pada topik yang sama dan telah terjadi, selain itu juga untuk memperbanyak sumber bacaan yang sudah ada.

b. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Memberikan masukan untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB).

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.